



Katalog BPS: 3205008

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2008



BUKU 1: PROVINSI



BADAN PUSAT STATISTIK

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2008

BUKU 1: PROVINSI

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2008

BUKU 1: PROVINSI

ISSN : 2085 - 9414

Katalog BPS : 3205008

No. Publikasi : 04340.0901

Ukuran buku : 16,5 cm x 22 cm

Naskah :

Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh :

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Selama ini data yang berkaitan dengan kemiskinan belum tersedia secara komprehensif sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menyajikan data dan informasi kemiskinan serta faktor-faktor yang terkait berdasarkan hasil survei, yang disajikan dalam beberapa publikasi.

Buku 1 Data dan Informasi Kemiskinan 2008 ini berisi data dan informasi mengenai kemiskinan dan indikator serta variabel lain yang terkait dengan masalah kemiskinan untuk tingkat provinsi. Data dan informasi yang ada dalam publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2008.

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2009

Badan Pusat Statistik
Kepala,

Dr. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
1. Pendahuluan	1
2. Tujuan Penulisan.....	1
3. Metode Penghitungan Kemiskinan Tingkat Nasional dan Provinsi	2
3.1. Garis Kemiskinan	2
3.2. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan	2
3.3. Indikator Kemiskinan	5
4. Konsep dan Definisi	7
4.1. Pendidikan	7
4.2. Ketenagakerjaan	7
4.3. Kesehatan	7
4.4. Fasilitas perumahan	8
5. Ulasan Singkat	9
5.1. Kemiskinan	9
5.2. Pendidikan	10
5.3. Ketenagakerjaan	11
5.4. Kesehatan	12
5.5. Fasilitas Perumahan	12
Daftar Pustaka	59

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006.....	15
Tabel 1.1.b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007.....	16
Tabel 1.1.c. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008.....	17
Tabel 1.2.a. Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006.....	18
Tabel 1.2.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007.....	19
Tabel 1.2.c. Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008.....	20
Tabel 1.3.a. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006.....	21
Tabel 1.3.b. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007.....	22
Tabel 1.3.c. Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008.....	23
Tabel 1.4.a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006.....	24
Tabel 1.4.b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007.....	25
Tabel 1.4.c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008.....	26
Tabel 1.5. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2008.....	27
Tabel 1.6. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2008..	28
Tabel 1.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Pendidikan Kepala Rumah Tahun 2008.....	29
Tabel 1.8. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2008.....	30
Tabel 1.9. Jumlah dan Disribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2008.....	31

Tabel 2.1.a.	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Provinsi Tahun 2008, Miskin.....	35
Tabel 2.1.b.	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Provinsi Tahun 2008, Tidak Miskin.....	36
Tabel 2.1.c.	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Provinsi Tahun 2008, Miskin + Tidak Miskin.....	37
Tabel 2.2.	Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 7-12 menurut Provinsi Tahun 2008.....	38
Tabel 2.3.	Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15 menurut Provinsi Tahun 2008.....	39
Tabel 3.1.	Persentase Pekerja Informal menurut Provinsi Tahun 2008.....	43
Tabel 4.1.a.	Persentase Balita yang Diimunisasi menurut Provinsi Tahun 2008, Miskin.....	47
Tabel 4.1.b.	Persentase Balita yang Diimunisasi menurut Provinsi Tahun 2008, Tidak Miskin.....	48
Tabel 4.1.c.	Persentase Balita yang Diimunisasi menurut Provinsi Tahun 2008, Miskin + Tidak Miskin.....	49
Tabel 4.2.a.	Persentase Penolong Persalinan Pertama oleh Tenaga Kesehatan menurut Provinsi Tahun 2008.....	50
Tabel 4.2.b.	Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan menurut Provinsi Tahun 2008.....	51
Tabel 4.3.	Persentase Pengguna Alat KB menurut Provinsi Tahun 2008.....	52
Tabel 5.1.a	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/Bersama menurut Provinsi Tahun 2008, Miskin.	53
Tabel 5.1.b	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/Bersama menurut Provinsi Tahun 2008, Tidak Miskin.....	54
Tabel 5.1.c	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih, Jamban Sendiri/Bersama menurut Provinsi Tahun 2008, Miskin + Tidak Miskin.....	55

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2008

I. PENDAHULUAN

- Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
- Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi.

II. TUJUAN PENULISAN

- Mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan-perdesaan) tahun 2008.
- Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut provinsi dan daerah (perkotaan-perdesaan) tahun 2008.

III. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN TINGKAT NASIONAL DAN PROPINSI

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Sumber data utama yang digunakan adalah data Susenas Modul Konsumsi Juli 2008 dengan jumlah sampel 280 ribu rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, penghitungan data juga menggunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang digunakan untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan.

3.1. Garis Kemiskinan

- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

- GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

3.2. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal.

GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

- GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung GKM adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_k$$

Keterangan:

GKM_j = GKM daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j .

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j .

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j .

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}},$$

Keterangan:

K_{jk} = kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100,$$

Keterangan:

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

- GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.
- Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Keterangan:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM_p).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p .

p = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

- GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin dan sebaliknya dikategorikan sebagai bukan miskin.

Penghitungan GK dengan data Susenas modul konsumsi Juli 2008 dilakukan menurut kabupaten/kota. GK di kabupaten/kota merupakan GK tertimbang penduduk daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara matematis GK dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$GK_i = \frac{W_{Ki} \times GK_{Ki} + W_{Di} \times GK_{Di}}{W_{Ki} + W_{Di}}$$

Keterangan:

GK_i = GK kabupaten/kota i

GK_{Ki} = GK kabupaten/kota i daerah perkotaan.

GK_{Di} = GK kabupaten/kota i daerah perdesaan

W_{Ki} = Jumlah penduduk kabupaten/kota i daerah perkotaan

W_{Di} = Jumlah penduduk kabupaten/kota i daerah perdesaan

GK provinsi adalah garis kemiskinan tertimbang penduduk menurut kabupaten/kota yang secara matematis diformulasikan sebagai berikut;

$$GKp = \frac{\sum_{i=1}^n GK_i \times W_i}{\sum_{i=1}^n W_i}$$

Keterangan:

GKp = GK Provinsi p

W_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

3.3. Indikator Kemiskinan

- *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah GK.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 0, 1, 2

z = GK

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah GK ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah GK

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2).

IV. KONSEP DAN DEFINISI

4.1. Pendidikan

- **Angka melek huruf (dewasa)** adalah proporsi seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf menurut kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin dan huruf lainnya.
- **Angka partisipasi sekolah** adalah proporsi dari seluruh penduduk (miskin + tidak miskin) dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.
- **Angka putus sekolah** adalah proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama. Publikasi ini menyajikan angka putus sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat dianggap sebagai suatu insiden kemiskinan yang tercermin dari ketidakmampuan rumah tangga tersebut dalam memenuhi kebutuhan minimum di bidang pendidikan.

4.2. Ketenagakerjaan

- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu.
- **Pekerja informal** adalah penduduk yang bekerja dengan status/kedudukan pekerjaannya sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/ tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja tidak dibayar.

4.3. Kesehatan

- **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (ditetaskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

- Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi adalah pelayanan proses persalinan. Keberhasilan proses persalinan sangat tergantung kepada petugas atau tenaga penolong yang menanganinya. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh dokter atau bidan.
- Oleh karena itu, data mengenai penolong kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.
- **Alat atau cara Keluarga Berencana (KB)**
 - a. Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi
 - b. Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi
 - c. AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim)/IUD/spiral
 - d. Suntikan KB
 - e. Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (alat kontrasepsi bawah kulit)
 - f. Pil KB
 - g. Kondom/karet KB
 - h. Intravag/tissue/kondom wanita
 - i. Alat/cara KB tradisional, antara lain: pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, tidak campur (puasa), jamu, urut.

4.4. Fasilitas Perumahan

- **Rumah tangga pengguna air bersih** adalah persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung (dengan jarak ke penampungan lebih dari 10 meter).
- Jamban adalah fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga.

V. ULASAN SINGKAT

KEMISKINAN:

- Pada Maret 2006 jumlah penduduk miskin secara nasional tercatat sebesar 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1.1.a). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2005), jumlah penduduk miskin secara nasional meningkat sebesar 6,77 persen. Dari jumlah ini, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan provinsi yang persentase penduduk miskinnya paling tinggi (lebih dari 30 persen), yaitu masing-masing sebesar 41,52 persen, 41,34 persen, dan 33,03 persen. Sedangkan provinsi yang persentase penduduk miskinnya kurang dari 10 persen hanya DKI Jakarta (4,57 persen), Banten (9,79 persen), Bali (7,08 persen), dan Kalimantan Selatan (8,32 persen).
- Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin secara nasional mengalami penurunan sebesar 5,41 persen dibanding tahun 2006 menjadi 37,2 juta jiwa atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1.1.b). Pada tahun ini, jumlah provinsi yang terkategori sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin rendah bertambah dua yaitu Bangka Belitung (9,54 persen) dan Kalimantan Tengah (9,38 persen). Dengan demikian, ada enam provinsi yang dianggap sebagai provinsi berpersentase penduduk miskin rendah yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.
- Tren penurunan angka kemiskinan juga terjadi pada tahun 2008. Pada Juli 2008, jumlah penduduk miskin secara nasional tercatat sebanyak 34,54 juta jiwa atau sekitar 15,15 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1.1.c). Apabila dibandingkan dengan tahun 2007 maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 7,60 persen. Dari 33 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku masih merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar walaupun persentasenya telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini tercatat 9 (sembilan) provinsi terkategori sebagai provinsi yang persentase penduduk miskinnya rendah. Kesembilan provinsi itu adalah Jambi (9,28 persen), Bangka Belitung (7,89 persen), Kepulauan Riau (8,73 persen), DKI Jakarta (3,86 persen), Banten (8,2 persen), Bali (5,85 persen), Kalimantan Tengah (8,36 persen), Kalimantan Selatan (6,21 persen), dan Kalimantan Timur (8,53 persen).
- Bila dilihat menurut daerah, secara umum terlihat bahwa pada kurun waktu antara 2006-2008, persentase penduduk miskin di perdesaan selalu lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Meskipun secara jumlah dan persentase sebenarnya mengalami penurunan. Pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 21,81 persen sedangkan di perkotaan hanya sekitar 13,47 persen saja. Demikian pula pada tahun 2007 dan 2008 yang

masing-masing sebesar 20,37 persen dan 18,63 persen untuk daerah perdesaan serta hanya 12,52 persen dan 11,43 persen untuk daerah perkotaan (Tabel 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c).

- Tabel 1.2.a – 1.2.c menunjukkan distribusi atau persebaran penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal antara tahun 2006-2008. Dari total penduduk miskin sekitar 34,54 juta pada tahun 2008, separuh lebih (63,56 persen) tinggal di daerah perdesaan, dan hanya 36,44 persen saja yang tinggal di perkotaan. Demikian pula pada tahun 2007 dan 2006 yang sebarannya hampir sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk miskin lebih banyak yang tinggal di daerah perdesaan daripada perkotaan. Namun demikian, pada beberapa provinsi (Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) penduduk miskin ini justru lebih banyak tinggal di daerah perkotaan.
- Kemiskinan seolah tidak akan pernah lepas dari rendahnya tingkat pendidikan. Dalam bahasa yang sederhana, pendidikan yang rendah akan berpotensi menjadikan seseorang untuk miskin. Fenomena ini setidaknya terlihat pada Tabel 1.7. Dari sekitar 34,54 juta penduduk miskin di Indonesia, lebih dari 80 persen kepala rumah tangganya adalah mereka yang belum/tidak tamat SD (46,56 persen) dan mereka yang hanya tamat SD (34,13 persen). Selain itu, separuh lebih kepala rumah tangga miskin ini adalah mereka yang bermata pencaharian pertanian (Tabel 1.8).

PENDIDIKAN

- Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi pembangunan. Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana terhadap bidang pendidikan. Anggaran pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap Pelita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
- Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.
- Untuk memperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan mengenyam pendidikan, maka

dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Putus Sekolah. Beberapa indikator pendidikan ini disajikan pada Tabel 2.1.a – Tabel 2.3.

- Pada tahun 2008 secara umum Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia untuk kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 99,75 persen. Sedangkan AMH kelompok usia 15-55 tahun mencapai 96,57 persen. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Papua merupakan provinsi dengan angka buta huruf yang paling tinggi. Pada tahun 2008, AMH usia 15-24 tahun adalah 87,33 persen dan AMH usia 15-55 tahun adalah 72,93 persen.
- Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tahun 2008, APS kelompok usia 7-12 tahun relatif merata di seluruh provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia, APS secara umum sudah mencapai 90 persen kecuali untuk Provinsi Papua yang hanya sebesar 82,84 persen. Berbeda dengan kelompok usia 7-12, APS pada kelompok usia 13-15 tahun terlihat cukup bervariasi antar provinsi. Sebagai contoh, pada tahun 2008 tercatat APS yang paling tinggi terdapat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar 94,10 persen dan yang terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 77,91 persen.
- Tingginya APS di Indonesia ternyata juga dibarengi dengan kecilnya angka putus sekolah baik di tingkat SD maupun SLTP. Hal ini terlihat pada Tabel 2.1.c dan 2.2 yaitu ketika APS usia SD (7-12 tahun) mencapai 97,83 persen, ternyata angka putus sekolah juga sangat rendah (0,43 persen saja). Hal demikian juga terjadi pada usia anak SLTP yaitu angka putus sekolahnya juga relatif kecil (6,08 persen).

KETENAGAKERJAAN

- Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting dalam pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu persaingan di dunia ketenagakerjaan tidak dapat dihindarkan, karena bagaimanapun mereka yang memiliki kualifikasi lebih baik tentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Problematika inilah yang tampaknya masih menjadi perhatian pemerintah yaitu bertambahnya tenaga kerja yang tersedia tidak diikuti oleh makin luasnya lapangan kerja yang akan menampungnya. Pemerataan kesempatan kerja bagi setiap penduduk sangatlah penting karenanya menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan. Untuk itu data mengenai indikator ketenagakerjaan sangatlah diperlukan bagi perencanaan di bidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang disajikan ini hanya berupa jumlah pekerja informal.
- Informasi mengenai penduduk yang bekerja di sektor informal disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan penghitungan pada tahun 2008, pekerja sektor informal di Indonesia tercatat sebesar 63,16 persen. Persentase tertinggi tercatat ada di

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 83,91 persen, sedangkan yang terendah tercatat di DKI Jakarta yaitu 33,63 persen.

KESEHATAN

- Salah satu aspek penting ukuran tingkat kesejahteraan rakyat adalah derajat kesehatan penduduk. Semakin baik derajat kesehatan masyarakat mengindikasikan semakin baiknya tingkat kesejahteraannya. Derajat kesehatan ini dapat dilihat dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Beberapa indikator kesehatan pada tingkat individu antara lain seperti pemberian imunisasi pada balita, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, dan keikutsertaan KB.
- Pada usia bayi terdapat 7 penyakit infeksi yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, yaitu poliomyelitis, campak, batuk rejan, tetanus, TBC dan hepatitis B. Penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi dan mempertahankan status gizi yang baik. Tabel 4.1 memberi gambaran tentang pemberian imunisasi pada balita menurut provinsi. Secara nasional balita yang telah menerima imunisasi BCG pada tahun 2008 tercatat sebesar 90,06 persen. Balita yang telah menerima imunisasi DPT dan polio masing-masing tercatat sebesar 87,11 persen dan 88,07 persen. Sedangkan balita yang telah menerima imunisasi campak dan hepatitis-B masing-masing sebesar 76,44 persen dan 83,63 persen.

FASILITAS PERUMAHAN

- Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat, tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan seluruh anggota rumah tangga yang menempatinnya. Ada beberapa indikator perumahan yang menunjukkan kategori rumah sehat antara lain: ketersediaan air bersih dan pemakaian jamban.
- Pada tahun 2008, lebih dari separuh (54,09 persen) rumah tangga di Indonesia telah menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Tabel 5.1). Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih paling banyak adalah di DKI Jakarta yang mencapai 87,77 persen. Sedangkan persentase terendah berada di Provinsi Kalimantan Barat yang hanya 19,13 persen.
- Sementara itu, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama secara nasional pada tahun 2008 ada sebanyak 60,60 persen. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang persentase rumah tangganya paling banyak menggunakan jamban sendiri/bersama (81,11 persen). Sedangkan yang terendah ada di Provinsi Gorontalo (29,72 persen).

Kemiskinan

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 1.1.a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+ D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	226,9	19,22	922,8	31,98	1.149,7	28,28
Sumatera Utara	863,6	14,73	1.033,5	15,25	1.897,1	15,01
Sumatera Barat	189,8	11,87	389,0	12,85	578,7	12,51
Riau	226,3	9,37	338,6	14,40	564,9	11,85
Jambi	142,5	16,30	162,1	8,98	304,6	11,37
Sumatera Selatan	599,5	22,32	847,4	20,14	1.446,9	20,99
Bengkulu	134,5	24,24	225,5	22,32	360,0	23,00
Lampung	398,6	20,35	1.239,4	23,67	1.638,0	22,77
Bangka Belitung	46,6	9,01	70,8	12,67	117,4	10,91
Kepulauan Riau	82,7	11,61	80,3	12,79	163,0	12,16
DKI Jakarta	407,1	4,57	0,0	0,00	407,1	4,57
Jawa Barat	2.777,1	11,90	2.935,4	18,16	5.712,5	14,49
Jawa Tengah	2.958,1	18,90	4.142,5	25,28	7.100,6	22,19
DI Yogyakarta	346,0	17,85	302,7	27,64	648,7	19,15
Jawa Timur	2.836,3	15,85	4.841,8	26,11	7.678,1	21,09
Banten	417,1	7,47	487,1	13,34	904,3	9,79
Bali	127,4	6,40	116,0	8,03	243,5	7,08
Nusa Tenggara Barat	573,3	31,95	582,8	23,69	1.156,1	27,17
Nusa Tenggara Timur	148,0	18,77	1.125,9	31,68	1.273,9	29,34
Kalimantan Barat	151,0	13,10	475,7	16,07	626,7	15,24
Kalimantan Tengah	52,9	7,97	159,9	12,57	212,8	11,00
Kalimantan selatan	102,6	7,35	175,8	9,03	278,5	8,32
Kalimantan Timur	127,3	6,93	208,1	18,85	335,5	11,41
Sulawesi Utara	66,2	7,01	183,2	15,05	249,4	11,54
Sulawesi Tengah	71,5	14,40	482,0	26,10	553,5	23,63
Sulawesi Selatan	167,8	6,83	944,2	18,25	1.112,0	14,57
Sulawesi Tenggara	29,9	6,46	436,8	28,47	466,8	23,37
Gorontalo	41,2	13,90	232,6	36,14	273,8	29,13
Sulawesi Barat	57,5	17,26	147,7	22,50	205,2	20,74
Maluku	46,2	13,86	372,4	39,87	418,6	33,03
Maluku Utara	20,7	7,53	96,1	14,95	116,8	12,73
Papua Barat	13,3	8,42	270,8	51,17	284,1	41,34
Papua	39,4	8,71	777,3	51,31	816,7	41,52
Indonesia	14.489,0	13,47	24.806,3	21,81	39.295,3	17,75

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2006

**Tabel 1.1.b. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+ D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	218,8	18,68	864,9	29,87	1.083,7	26,65
Sumatera Utara	833,5	14,21	935,0	13,63	1.768,5	13,90
Sumatera Barat	149,2	9,78	380,0	13,01	529,2	11,90
Riau	246,4	9,53	328,1	12,90	574,5	11,20
Jambi	137,2	15,42	144,7	7,81	281,9	10,27
Sumatera Selatan	545,9	20,30	785,9	18,43	1.331,8	19,15
Bengkulu	135,6	23,00	235,0	21,66	370,6	22,13
Lampung	366,0	18,11	1.295,7	23,70	1.661,7	22,19
Bangka Belitung	38,6	8,09	56,5	10,87	95,1	9,54
Kepulauan Riau	76,8	10,08	71,6	10,54	148,4	10,30
DKI Jakarta	405,7	4,61	0,0	0,00	405,7	4,61
Jawa Barat	2.654,6	11,21	2.803,3	16,88	5.457,9	13,55
Jawa Tengah	2.687,3	17,23	3.869,9	23,45	6.557,2	20,43
DI Yogyakarta	335,3	15,63	298,2	25,03	633,5	18,99
Jawa Timur	2.575,7	14,71	4.579,6	25,02	7.155,3	19,98
Banten	399,4	6,79	486,8	12,52	886,2	9,07
Bali	119,8	6,01	109,3	7,47	229,1	6,63
Nusa Tenggara Barat	570,9	30,44	547,7	21,06	1.118,6	24,99
Nusa Tenggara Timur	124,9	16,41	1.038,7	29,95	1.163,6	27,51
Kalimantan Barat	144,1	11,45	440,2	13,47	584,3	12,91
Kalimantan Tengah	51,2	6,72	159,1	10,76	210,3	9,38
Kalimantan selatan	83,1	6,01	150,4	7,72	233,5	7,01
Kalimantan Timur	136,1	7,44	188,7	16,98	324,8	11,04
Sulawesi Utara	79,0	8,31	171,1	13,80	250,1	11,42
Sulawesi Tengah	67,1	12,86	490,3	24,97	557,4	22,42
Sulawesi Selatan	152,8	6,18	930,6	17,87	1.083,4	14,11
Sulawesi Tenggara	31,3	6,24	434,1	25,84	465,4	21,33
Gorontalo	30,7	11,08	211,2	34,76	241,9	27,35
Sulawesi Barat	55,1	16,53	134,8	20,29	189,9	19,03
Maluku	49,1	14,49	355,6	37,02	404,7	31,14
Maluku Utara	11,7	4,29	98,2	15,22	109,9	11,97
Papua Barat	11,0	7,14	255,8	48,82	266,8	39,31
Papua	35,4	7,97	758,0	50,47	793,4	40,78
Indonesia	13.559,3	12,52	23.609,0	20,37	37.168,3	16,58

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.1.c. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+ D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	189,3	16,09	773,0	26,57	962,3	23,55
Sumatera Utara	721,6	12,11	889,9	12,77	1.611,5	12,47
Sumatera Barat	124,2	8,08	349,5	11,87	473,7	10,57
Riau	260,1	9,52	324,6	12,07	584,7	10,79
Jambi	120,0	13,16	141,2	7,43	261,2	9,28
Sumatera Selatan	498,2	18,14	756,1	17,38	1.254,3	17,67
Bengkulu	116,1	19,18	212,7	19,08	328,9	19,12
Lampung	375,2	18,21	1.222,7	21,94	1.597,8	20,93
Bangka Belitung	33,3	6,85	47,0	8,85	80,3	7,89
Kepulauan Riau	64,5	8,07	67,3	9,46	131,8	8,73
DKI Jakarta	342,5	3,86	0,0	0,00	342,5	3,86
Jawa Barat	2.645,9	10,92	2.603,6	15,34	5.249,5	12,74
Jawa Tengah	2.523,5	16,10	3.599,1	21,72	6.122,6	18,99
DI Yogyakarta	324,8	14,95	284,1	23,55	608,9	18,02
Jawa Timur	2.308,8	13,12	4.240,2	23,05	6.549,0	18,19
Banten	367,3	6,02	463,1	11,49	830,4	8,20
Bali	107,2	5,29	98,5	6,63	205,7	5,85
Nusa Tenggara Barat	548,4	28,65	520,5	19,61	1.068,8	23,40
Nusa Tenggara Timur	115,3	14,90	990,5	28,04	1.105,8	25,68
Kalimantan Barat	120,1	9,34	382,7	11,46	502,8	10,87
Kalimantan Tengah	41,7	5,28	152,6	9,95	194,3	8,36
Kalimantan selatan	76,4	5,41	134,7	6,77	211,1	6,21
Kalimantan Timur	85,6	4,52	173,9	15,12	259,5	8,53
Sulawesi Utara	68,7	7,12	149,5	11,86	218,2	9,80
Sulawesi Tengah	58,2	10,87	467,0	23,20	525,2	20,61
Sulawesi Selatan	145,5	5,81	896,7	17,02	1.042,2	13,41
Sulawesi Tenggara	28,5	5,49	408,6	23,52	437,1	19,38
Gorontalo	29,7	10,61	153,2	24,96	182,9	20,47
Sulawesi Barat	47,4	13,80	109,5	16,00	156,9	15,27
Maluku	43,1	12,43	345,7	35,18	388,8	29,24
Maluku Utara	9,3	3,35	98,5	14,96	107,9	11,51
Papua Barat	12,0	7,45	225,3	41,18	237,3	33,49
Papua	34,1	7,49	675,2	43,82	709,3	35,53
Indonesia	12.586,2	11,43	21.956,7	18,63	34.543,0	15,15

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 1.2.a. Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+ D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	226,9	19,73	922,8	80,27	1.149,7	100,00
Sumatera Utara	863,6	45,52	1.033,5	54,48	1.897,1	100,00
Sumatera Barat	189,8	32,79	389,0	67,21	578,7	100,00
Riau	226,3	40,06	338,6	59,94	564,9	100,00
Jambi	142,5	46,78	162,1	53,22	304,6	100,00
Sumatera Selatan	599,5	41,43	847,4	58,57	1.446,9	100,00
Bengkulu	134,5	37,36	225,5	62,64	360,0	100,00
Lampung	398,6	24,33	1.239,4	75,67	1.638,0	100,00
Bangka Belitung	46,6	39,72	70,8	60,28	117,4	100,00
Kepulauan Riau	82,7	50,76	80,3	49,24	163,0	100,00
DKI Jakarta	407,1	100,00	0,0	0,00	407,1	100,00
Jawa Barat	2.777,1	48,61	2.935,4	51,39	5.712,5	100,00
Jawa Tengah	2.958,1	41,66	4.142,5	58,34	7.100,6	100,00
DI Yogyakarta	346,0	53,34	302,7	46,66	648,7	100,00
Jawa Timur	2.836,3	36,94	4.841,8	63,06	7.678,1	100,00
Banten	417,1	46,13	487,1	53,87	904,3	100,00
Bali	127,4	52,34	116,0	47,66	243,5	100,00
Nusa Tenggara Barat	573,3	49,59	582,8	50,41	1.156,1	100,00
Nusa Tenggara Timur	148,0	11,62	1.125,9	88,38	1.273,9	100,00
Kalimantan Barat	151,0	24,09	475,7	75,91	626,7	100,00
Kalimantan Tengah	52,9	24,84	159,9	75,16	212,8	100,00
Kalimantan selatan	102,6	36,86	175,8	63,14	278,5	100,00
Kalimantan Timur	127,3	37,96	208,1	62,04	335,5	100,00
Sulawesi Utara	66,2	26,54	183,2	73,46	249,4	100,00
Sulawesi Tengah	71,5	12,91	482,0	87,09	553,5	100,00
Sulawesi Selatan	167,8	15,09	944,2	84,91	1.112,0	100,00
Sulawesi Tenggara	29,9	6,41	436,8	93,59	466,8	100,00
Gorontalo	41,2	15,05	232,6	84,95	273,8	100,00
Sulawesi Barat	57,5	28,02	147,7	71,98	205,2	100,00
Maluku	46,2	11,04	372,4	88,96	418,6	100,00
Maluku Utara	20,7	17,71	96,1	82,29	116,8	100,00
Papua Barat	13,3	4,68	270,8	95,32	284,1	100,00
Papua	39,4	4,82	777,3	95,18	816,7	100,00
Indonesia	14.489,0	36,87	24.806,3	63,13	39.295,3	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2006

**Tabel 1.2.b. Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+ D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	218,8	20,19	864,9	79,81	1.083,7	100,00
Sumatera Utara	833,5	47,13	935,0	52,87	1.768,5	100,00
Sumatera Barat	149,2	28,19	380,0	71,81	529,2	100,00
Riau	246,4	42,89	328,1	57,11	574,5	100,00
Jambi	137,2	48,67	144,7	51,33	281,9	100,00
Sumatera Selatan	545,9	40,99	785,9	59,01	1.331,8	100,00
Bengkulu	135,6	36,59	235,0	63,41	370,6	100,00
Lampung	366,0	22,03	1.295,7	77,97	1.661,7	100,00
Bangka Belitung	38,6	40,59	56,5	59,41	95,1	100,00
Kepulauan Riau	76,8	51,75	71,6	48,25	148,4	100,00
DKI Jakarta	405,7	100,00	0,0	0,00	405,7	100,00
Jawa Barat	2.654,6	48,64	2.803,3	51,36	5.457,9	100,00
Jawa Tengah	2.687,3	40,98	3.869,9	59,02	6.557,2	100,00
DI Yogyakarta	335,3	52,93	298,2	47,07	633,5	100,00
Jawa Timur	2.575,7	36,00	4.579,6	64,00	7.155,3	100,00
Banten	399,4	45,07	486,8	54,93	886,2	100,00
Bali	119,8	52,29	109,3	47,71	229,1	100,00
Nusa Tenggara Barat	570,9	51,04	547,7	48,96	1.118,6	100,00
Nusa Tenggara Timur	124,9	10,73	1.038,7	89,27	1.163,6	100,00
Kalimantan Barat	144,1	24,66	440,2	75,34	584,3	100,00
Kalimantan Tengah	51,2	24,35	159,1	75,65	210,3	100,00
Kalimantan selatan	83,1	35,59	150,4	64,41	233,5	100,00
Kalimantan Timur	136,1	41,90	188,7	58,10	324,8	100,00
Sulawesi Utara	79,0	31,59	171,1	68,41	250,1	100,00
Sulawesi Tengah	67,1	12,04	490,3	87,96	557,4	100,00
Sulawesi Selatan	152,8	14,10	930,6	85,90	1.083,4	100,00
Sulawesi Tenggara	31,3	6,73	434,1	93,27	465,4	100,00
Gorontalo	30,7	12,69	211,2	87,31	241,9	100,00
Sulawesi Barat	55,1	29,02	134,8	70,98	189,9	100,00
Maluku	49,1	12,13	355,6	87,87	404,7	100,00
Maluku Utara	11,7	10,65	98,2	89,35	109,9	100,00
Papua Barat	11,0	4,12	255,8	95,88	266,8	100,00
Papua	35,4	4,46	758,0	95,54	793,4	100,00
Indonesia	13.559,3	36,48	23.609,0	63,52	37.168,3	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.2.c. Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Daerah, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+ D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	189,3	19,67	773,0	80,33	962,3	100,00
Sumatera Utara	721,6	44,78	889,9	55,22	1.611,5	100,00
Sumatera Barat	124,2	26,21	349,5	73,79	473,7	100,00
Riau	260,1	44,48	324,6	55,52	584,7	100,00
Jambi	120,0	45,93	141,2	54,07	261,2	100,00
Sumatera Selatan	498,2	39,72	756,1	60,28	1.254,3	100,00
Bengkulu	116,1	35,31	212,7	64,69	328,9	100,00
Lampung	375,2	23,48	1.222,7	76,52	1.597,8	100,00
Bangka Belitung	33,3	41,47	47,0	58,53	80,3	100,00
Kepulauan Riau	64,5	48,92	67,3	51,08	131,8	100,00
DKI Jakarta	342,5	100,00	0,0	0,00	342,5	100,00
Jawa Barat	2.645,9	50,40	2.603,6	49,60	5.249,5	100,00
Jawa Tengah	2.523,5	41,22	3.599,1	58,78	6.122,6	100,00
DI Yogyakarta	324,8	53,34	284,1	46,66	608,9	100,00
Jawa Timur	2.308,8	35,25	4.240,2	64,75	6.549,0	100,00
Banten	367,3	44,23	463,1	55,77	830,4	100,00
Bali	107,2	52,11	98,5	47,89	205,7	100,00
Nusa Tenggara Barat	548,4	51,31	520,5	48,69	1.068,8	100,00
Nusa Tenggara Timur	115,3	10,42	990,5	89,58	1.105,8	100,00
Kalimantan Barat	120,1	23,89	382,7	76,11	502,8	100,00
Kalimantan Tengah	41,7	21,46	152,6	78,54	194,3	100,00
Kalimantan selatan	76,4	36,18	134,7	63,82	211,1	100,00
Kalimantan Timur	85,6	32,98	173,9	67,02	259,5	100,00
Sulawesi Utara	68,7	31,50	149,5	68,50	218,2	100,00
Sulawesi Tengah	58,2	11,08	467,0	88,92	525,2	100,00
Sulawesi Selatan	145,5	13,96	896,7	86,04	1.042,2	100,00
Sulawesi Tenggara	28,5	6,52	408,6	93,48	437,1	100,00
Gorontalo	29,7	16,23	153,2	83,77	182,9	100,00
Sulawesi Barat	47,4	30,19	109,5	69,81	156,9	100,00
Maluku	43,1	11,09	345,7	88,91	388,8	100,00
Maluku Utara	9,3	8,65	98,5	91,35	107,9	100,00
Papua Barat	12,0	5,07	225,3	94,93	237,3	100,00
Papua	34,1	4,81	675,2	95,19	709,3	100,00
Indonesia	12.586,2	36,44	21.956,7	63,56	34.543,0	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 1.3.a. Garis Kemiskinan (Rp/ Kap/ Bln) menurut Provinsi dan Daerah,
Tahun 2006**

Provinsi	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+ D
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	227.075	191.621	198.858
Sumatera Utara	192.644	141.438	162.677
Sumatera Barat	192.063	147.462	154.218
Riau	216.880	178.225	185.063
Jambi	201.703	142.849	154.911
Sumatera Selatan	191.595	142.103	160.607
Bengkulu	192.359	131.666	160.641
Lampung	176.783	134.326	144.934
Bangka Belitung	216.585	210.620	212.094
Kepulauan Riau	260.239	184.587	228.610
DKI Jakarta	250.298	-	250.298
Jawa Barat	169.019	133.752	149.673
Jawa Tengah	155.874	130.979	142.337
DI Yogyakarta	184.638	148.523	170.720
Jawa Timur	159.586	133.032	145.205
Banten	186.665	129.687	160.688
Bali	174.038	142.579	161.763
Nusa Tenggara Barat	156.643	125.613	140.712
Nusa Tenggara Timur	163.374	104.221	114.982
Kalimantan Barat	165.465	127.308	134.747
Kalimantan Tengah	172.522	140.089	151.905
Kalimantan selatan	177.894	129.681	147.915
Kalimantan Timur	229.358	177.597	207.282
Sulawesi Utara	161.434	139.349	145.285
Sulawesi Tengah	179.643	137.179	147.443
Sulawesi Selatan	145.959	109.454	120.786
Sulawesi Tenggara	134.065	122.081	124.264
Gorontalo	143.425	126.539	130.668
Sulawesi Barat	144.060	121.380	130.480
Maluku	199.838	162.277	173.201
Maluku Utara	184.129	137.590	150.812
Papua Barat	206.610	198.725	202.340
Papua	218.826	175.481	180.201
Indonesia	174.290	130.584	151.997

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2006

**Tabel 1.3.b. Garis Kemiskinan (Rp/ Kap/ Bln) menurut Provinsi dan Daerah,
Tahun 2007**

Provinsi	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+ D
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	246.375	206.724	218.143
Sumatera Utara	205.379	154.827	178.132
Sumatera Barat	213.942	163.301	180.669
Riau	233.732	194.019	214.034
Jambi	214.769	152.019	172.349
Sumatera Selatan	205.145	161.205	178.209
Bengkulu	210.082	149.468	170.802
Lampung	187.923	145.634	157.052
Bangka Belitung	236.854	234.028	235.379
Kepulauan Riau	278.742	213.985	248.241
DKI Jakarta	266.874	-	266.874
Jawa Barat	180.821	144.204	165.734
Jawa Tengah	168.186	140.803	154.111
DI Yogyakarta	200.855	156.349	184.965
Jawa Timur	166.546	140.322	153.145
Banten	188.392	140.885	169.485
Bali	179.141	147.963	165.954
Nusa Tenggara Barat	176.591	130.867	150.026
Nusa Tenggara Timur	185.975	113.310	126.389
Kalimantan Barat	166.230	133.403	142.529
Kalimantan Tengah	179.418	153.430	162.266
Kalimantan selatan	185.289	144.647	161.514
Kalimantan Timur	239.560	188.787	220.368
Sulawesi Utara	165.824	149.440	156.550
Sulawesi Tengah	181.555	146.682	154.006
Sulawesi Selatan	149.439	115.788	126.623
Sulawesi Tenggara	142.103	127.197	130.625
Gorontalo	146.458	134.410	138.181
Sulawesi Barat	144.842	130.428	135.242
Maluku	205.046	170.547	179.552
Maluku Utara	192.287	153.526	165.039
Papua Barat	209.518	204.958	205.998
Papua	242.556	190.513	202.379
Indonesia	187.942	146.837	166.697

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.3.c. Garis Kemiskinan (Rp/ Kap/ Bln) menurut Provinsi dan Daerah,
Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+ D
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	275.981	237.563	248.627
Sumatera Utara	226.683	183.698	203.514
Sumatera Barat	232.121	191.207	205.240
Riau	262.163	219.116	240.811
Jambi	244.688	174.275	197.089
Sumatera Selatan	248.769	186.982	210.893
Bengkulu	242.532	180.647	202.428
Lampung	218.021	174.553	186.290
Bangka Belitung	263.671	245.359	254.112
Kepulauan Riau	304.229	245.153	276.400
DKI Jakarta	298.237	-	298.237
Jawa Barat	207.187	167.384	190.788
Jawa Tengah	201.185	163.621	181.877
DI Yogyakarta	216.353	177.165	202.362
Jawa Timur	197.118	163.267	179.819
Banten	209.380	165.567	191.943
Bali	211.646	177.786	197.325
Nusa Tenggara Barat	209.101	162.497	182.024
Nusa Tenggara Timur	224.586	147.852	161.639
Kalimantan Barat	192.797	159.757	168.942
Kalimantan Tengah	204.825	193.462	197.325
Kalimantan selatan	212.487	174.160	190.067
Kalimantan Timur	261.345	215.683	244.084
Sulawesi Utara	191.389	172.582	180.744
Sulawesi Tengah	209.286	171.122	179.137
Sulawesi Selatan	183.153	145.702	157.761
Sulawesi Tenggara	175.530	166.980	168.947
Gorontalo	170.855	158.438	162.325
Sulawesi Barat	170.566	154.079	159.585
Maluku	229.462	190.493	200.665
Maluku Utara	224.307	181.567	194.262
Papua Barat	318.904	256.635	270.990
Papua	301.548	240.816	254.663
Indonesia	219.252	173.647	195.678

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

Tabel 1.4.a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2006

Provinsi	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	4,32	1,47	10,65	3,40	5,28	1,84
Sumatera Utara	2,46	0,67	2,56	0,71	2,52	0,69
Sumatera Barat	2,00	0,52	2,05	0,57	2,04	0,56
Riau	2,12	0,67	1,08	0,26	1,43	0,40
Jambi	3,70	1,10	1,24	0,30	1,95	0,53
Sumatera Selatan	4,30	1,23	2,99	0,76	3,44	0,92
Bengkulu	4,76	1,55	3,81	0,95	4,06	1,12
Lampung	3,94	1,11	4,82	1,36	4,62	1,30
Bangka Belitung	1,27	0,31	1,75	0,45	1,56	0,39
Kepulauan Riau	1,49	0,43	1,00	0,23	1,39	0,39
DKI Jakarta	0,75	0,19	-	-	0,75	0,19
Jawa Barat	1,74	0,47	2,90	0,78	2,28	0,62
Jawa Tengah	2,75	0,72	4,37	1,10	3,69	0,94
DI Yogyakarta	1,72	0,44	7,13	1,95	4,12	1,11
Jawa Timur	2,71	0,76	4,84	1,33	3,94	1,09
Banten	2,23	0,62	1,81	0,47	2,04	0,55
Bali	0,77	0,17	0,72	0,18	0,74	0,17
Nusa Tenggara Barat	3,39	0,91	4,90	1,35	4,30	1,17
Nusa Tenggara Timur	1,56	0,43	6,55	1,86	5,74	1,63
Kalimantan Barat	3,25	0,99	2,15	0,49	2,47	0,64
Kalimantan Tengah	0,74	0,18	2,07	0,58	1,68	0,46
Kalimantan selatan	1,64	0,45	1,07	0,24	1,28	0,32
Kalimantan Timur	1,62	0,48	4,17	1,24	2,77	0,82
Sulawesi Utara	1,35	0,34	3,82	1,11	2,87	0,82
Sulawesi Tengah	2,52	0,67	7,39	2,30	4,54	1,33
Sulawesi Selatan	1,20	0,30	2,86	0,75	2,33	0,61
Sulawesi Tenggara	1,20	0,34	6,27	1,90	4,07	1,07
Gorontalo	1,71	0,47	9,07	2,92	6,05	1,86
Sulawesi Barat	2,83	0,61	3,78	0,99	3,64	0,93
Maluku	2,09	0,60	9,73	3,42	7,51	2,60
Maluku Utara	0,26	0,06	2,72	0,78	2,01	0,57
Papua Barat	2,94	0,86	10,48	3,44	8,08	2,62
Papua	2,32	0,67	15,24	6,36	12,07	4,97
Indonesia	2,61	0,77	4,22	1,22	3,43	1,00

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2006

Tabel 1.4.b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	3,86	1,23	6,04	1,81	5,41	1,64
Sumatera Utara	2,34	0,61	2,01	0,51	2,17	0,55
Sumatera Barat	1,35	0,30	2,10	0,52	1,84	0,44
Riau	2,02	0,68	2,35	0,67	2,18	0,68
Jambi	3,08	0,98	1,31	0,32	1,88	0,54
Sumatera Selatan	4,92	1,63	3,16	0,83	3,84	1,14
Bengkulu	4,45	1,15	3,81	0,92	4,03	1,00
Lampung	3,23	0,93	4,20	1,12	3,94	1,07
Bangka Belitung	1,25	0,32	2,08	0,60	1,68	0,47
Kepulauan Riau	2,33	0,70	1,42	0,29	1,90	0,50
DKI Jakarta	0,59	0,12	-	-	0,59	0,12
Jawa Barat	1,93	0,50	2,74	0,67	2,26	0,57
Jawa Tengah	3,33	0,96	4,32	1,19	3,84	1,08
DI Yogyakarta	3,08	0,88	5,08	1,55	3,80	1,12
Jawa Timur	2,76	0,79	5,01	1,49	3,91	1,15
Banten	1,09	0,28	1,86	0,44	1,40	0,34
Bali	0,98	0,27	0,87	0,18	0,94	0,23
Nusa Tenggara Barat	6,85	2,24	3,89	1,04	5,13	1,54
Nusa Tenggara Timur	3,89	1,29	5,08	1,35	4,87	1,34
Kalimantan Barat	2,00	0,49	1,70	0,38	1,79	0,41
Kalimantan Tengah	0,98	0,38	2,04	0,57	1,68	0,51
Kalimantan selatan	0,70	0,14	0,89	0,18	0,81	0,16
Kalimantan Timur	1,17	0,28	2,86	0,76	1,81	0,46
Sulawesi Utara	1,30	0,31	2,33	0,60	1,88	0,47
Sulawesi Tengah	2,14	0,56	5,08	1,60	4,46	1,38
Sulawesi Selatan	0,91	0,22	3,40	0,89	2,60	0,68
Sulawesi Tenggara	0,78	0,15	5,39	1,52	4,33	1,21
Gorontalo	1,82	0,44	7,27	2,25	5,57	1,68
Sulawesi Barat	1,73	0,40	3,02	0,66	2,59	0,57
Maluku	2,38	0,58	7,79	2,29	6,38	1,84
Maluku Utara	1,25	0,49	2,64	0,71	2,23	0,64
Papua Barat	0,73	0,12	16,58	7,29	12,97	5,66
Papua	1,25	0,29	13,67	4,94	10,84	3,88
Indonesia	2,15	0,57	3,78	1,09	2,99	0,84

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2007

**Tabel 1.4.c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) menurut Provinsi dan Daerah, Tahun 2008**

Provinsi	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P1 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	2,94	0,84	6,08	1,84	5,18	1,55
Sumatera Utara	1,74	0,41	2,36	0,61	2,07	0,52
Sumatera Barat	0,85	0,17	2,19	0,57	1,73	0,44
Riau	1,59	0,42	3,30	1,08	2,44	0,75
Jambi	1,82	0,44	1,95	0,65	1,91	0,58
Sumatera Selatan	3,27	0,90	4,33	1,29	3,92	1,14
Bengkulu	3,31	0,90	4,27	1,23	3,93	1,12
Lampung	2,74	0,63	5,05	1,48	4,43	1,25
Bangka Belitung	1,11	0,28	1,55	0,39	1,34	0,34
Kepulauan Riau	1,63	0,46	2,13	0,65	1,87	0,55
DKI Jakarta	0,58	0,13	-	-	0,58	0,13
Jawa Barat	2,27	0,63	3,74	1,14	2,88	0,84
Jawa Tengah	2,97	0,79	5,46	1,67	4,25	1,24
DI Yogyakarta	2,67	0,69	4,89	1,34	3,46	0,92
Jawa Timur	2,78	0,79	5,09	1,50	3,96	1,15
Banten	1,08	0,30	2,25	0,60	1,55	0,42
Bali	0,90	0,21	1,81	0,58	1,29	0,36
Nusa Tenggara Barat	4,80	1,30	5,05	1,54	4,95	1,44
Nusa Tenggara Timur	3,95	1,25	9,22	3,48	8,27	3,08
Kalimantan Barat	1,63	0,51	2,66	0,80	2,38	0,72
Kalimantan Tengah	0,83	0,22	1,80	0,42	1,47	0,35
Kalimantan selatan	0,82	0,20	1,46	0,38	1,20	0,31
Kalimantan Timur	0,66	0,16	4,30	1,44	2,03	0,65
Sulawesi Utara	1,29	0,35	2,43	0,69	1,94	0,54
Sulawesi Tengah	1,45	0,36	5,78	1,84	4,87	1,53
Sulawesi Selatan	1,06	0,26	4,60	1,48	3,46	1,08
Sulawesi Tenggara	0,92	0,20	6,28	2,01	5,05	1,59
Gorontalo	1,14	0,17	4,82	1,24	3,67	0,90
Sulawesi Barat	2,25	0,47	4,03	1,18	3,44	0,94
Maluku	1,29	0,23	8,86	2,83	6,89	2,15
Maluku Utara	0,52	0,11	3,30	1,04	2,47	0,76
Papua Barat	2,38	0,87	13,33	5,64	10,83	4,55
Papua	2,89	1,30	13,60	5,44	11,16	4,50
Indonesia	2,14	0,58	4,52	1,40	3,37	1,00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 1.5. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2008**

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+ P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	472,5	49,10	489,8	50,90	962,3	100,00
Sumatera Utara	806,0	50,01	805,5	49,99	1.611,5	100,00
Sumatera Barat	231,5	48,88	242,2	51,12	473,7	100,00
Riau	293,6	50,22	291,1	49,78	584,7	100,00
Jambi	129,0	49,40	132,2	50,60	261,2	100,00
Sumatera Selatan	624,6	49,80	629,7	50,20	1.254,3	100,00
Bengkulu	167,5	50,93	161,4	49,07	328,9	100,00
Lampung	822,1	51,45	775,7	48,55	1.597,8	100,00
Bangka Belitung	38,2	47,60	42,1	52,40	80,3	100,00
Kepulauan Riau	70,7	53,64	61,1	46,36	131,8	100,00
DKI Jakarta	172,9	50,48	169,6	49,52	342,5	100,00
Jawa Barat	2.674,2	50,94	2.575,3	49,06	5.249,5	100,00
Jawa Tengah	2.997,7	48,96	3.124,9	51,04	6.122,6	100,00
DI Yogyakarta	296,0	48,62	312,9	51,38	608,9	100,00
Jawa Timur	3.197,5	48,82	3.351,5	51,18	6.549,0	100,00
Banten	415,8	50,07	414,6	49,93	830,4	100,00
Bali	95,5	46,45	110,1	53,55	205,7	100,00
Nusa Tenggara Barat	500,4	46,82	568,4	53,18	1.068,8	100,00
Nusa Tenggara Timur	556,2	50,30	549,6	49,70	1.105,8	100,00
Kalimantan Barat	255,2	50,76	247,6	49,24	502,8	100,00
Kalimantan Tengah	97,6	50,23	96,7	49,77	194,3	100,00
Kalimantan selatan	101,0	47,83	110,2	52,17	211,1	100,00
Kalimantan Timur	135,0	52,02	124,5	47,98	259,5	100,00
Sulawesi Utara	112,8	51,70	105,4	48,30	218,2	100,00
Sulawesi Tengah	267,8	50,99	257,4	49,01	525,2	100,00
Sulawesi Selatan	511,5	49,08	530,7	50,92	1.042,2	100,00
Sulawesi Tenggara	215,3	49,25	221,8	50,75	437,1	100,00
Gorontalo	93,7	51,24	89,2	48,76	182,9	100,00
Sulawesi Barat	76,6	48,82	80,3	51,18	156,9	100,00
Maluku	195,5	50,28	193,3	49,72	388,8	100,00
Maluku Utara	54,3	50,32	53,6	49,68	107,9	100,00
Papua Barat	118,4	49,90	118,9	50,10	237,3	100,00
Papua	370,6	52,25	338,7	47,75	709,3	100,00
Indonesia	17.167,2	49,70	17.375,8	50,30	34.542,9	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 1.6. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut
Provinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2008**

Provinsi	Laki-laki (L)		Perempuan (P)		L+ P	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	814,8	84,67	147,6	15,33	962,3	100,00
Sumatera Utara	1.469,8	91,20	141,7	8,80	1.611,5	100,00
Sumatera Barat	422,0	89,09	51,7	10,91	473,7	100,00
Riau	539,7	92,30	45,0	7,70	584,7	100,00
Jambi	229,2	87,75	32,0	12,25	261,2	100,00
Sumatera Selatan	1.164,7	92,86	89,6	7,14	1.254,3	100,00
Bengkulu	302,3	91,93	26,5	8,07	328,9	100,00
Lampung	1.479,9	92,62	117,9	7,38	1.597,8	100,00
Bangka Belitung	71,7	89,26	8,6	10,74	80,3	100,00
Kepulauan Riau	116,0	88,03	15,8	11,97	131,8	100,00
DKI Jakarta	302,4	88,30	40,1	11,70	342,5	100,00
Jawa Barat	4.807,0	91,57	442,5	8,43	5.249,5	100,00
Jawa Tengah	5.498,3	89,80	624,2	10,20	6.122,6	100,00
DI Yogyakarta	558,4	91,71	50,5	8,29	608,9	100,00
Jawa Timur	5.804,3	88,63	744,7	11,37	6.549,0	100,00
Banten	768,1	92,50	62,3	7,50	830,4	100,00
Bali	197,0	95,81	8,6	4,19	205,7	100,00
Nusa Tenggara Barat	895,9	83,82	173,0	16,18	1.068,8	100,00
Nusa Tenggara Timur	1.005,3	90,91	100,5	9,09	1.105,8	100,00
Kalimantan Barat	464,8	92,44	38,0	7,56	502,8	100,00
Kalimantan Tengah	176,9	91,07	17,3	8,93	194,3	100,00
Kalimantan selatan	178,6	84,57	32,6	15,43	211,1	100,00
Kalimantan Timur	241,8	93,20	17,6	6,80	259,5	100,00
Sulawesi Utara	201,5	92,34	16,7	7,66	218,2	100,00
Sulawesi Tengah	485,9	92,52	39,3	7,48	525,2	100,00
Sulawesi Selatan	902,0	86,55	140,2	13,45	1.042,2	100,00
Sulawesi Tenggara	380,4	87,01	56,8	12,99	437,1	100,00
Gorontalo	169,4	92,60	13,5	7,40	182,9	100,00
Sulawesi Barat	138,6	88,37	18,2	11,63	156,9	100,00
Maluku	361,4	92,94	27,5	7,06	388,8	100,00
Maluku Utara	101,8	94,35	6,1	5,65	107,9	100,00
Papua Barat	222,2	93,65	15,1	6,35	237,3	100,00
Papua	679,5	95,81	29,7	4,19	709,3	100,00
Indonesia	31.151,5	90,18	3.391,5	9,82	34.543,0	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 1.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan
Kepala Rumah Tangga Tahun 2008**

Provinsi	Tidak Tamat/ < SD		SD		SLTP		SLTA		Diatas SLTA		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nangroe Aceh Darussalam	327,2	34,00	339,3	35,26	165,3	17,18	121,7	12,65	8,7	0,90	962,1	100,00
Sumatera Utara	477,8	29,65	506,9	31,45	357,3	22,17	259,6	16,11	9,9	0,62	1.611,5	100,00
Sumatera Barat	205,1	43,29	140,4	29,63	68,7	14,50	55,4	11,70	4,1	0,87	473,7	100,00
Riau	198,7	33,98	204,2	34,92	84,4	14,44	89,8	15,36	7,6	1,30	584,7	100,00
Jambi	116,4	44,56	73,9	28,30	38,5	14,76	32,3	12,38	0,0	0,00	261,2	100,00
Sumatera Selatan	455,4	36,31	484,5	38,63	181,7	14,49	127,4	10,15	5,4	0,43	1.254,3	100,00
Bengkulu	122,7	37,32	102,2	31,08	52,5	15,98	49,2	14,96	2,1	0,65	328,9	100,00
Lampung	770,4	48,21	521,7	32,65	167,5	10,48	136,1	8,52	2,3	0,14	1.597,8	100,00
Bangka Belitung	41,3	51,40	26,6	33,08	6,6	8,20	5,5	6,82	0,4	0,49	80,3	100,00
Kepulauan Riau	48,4	36,73	47,5	36,05	17,8	13,49	16,1	12,24	2,0	1,49	131,8	100,00
DKI Jakarta	106,2	31,02	90,8	26,50	75,1	21,94	70,3	20,54	0,0	0,00	342,5	100,00
Jawa Barat	2.324,2	44,28	2.137,4	40,72	435,5	8,30	331,7	6,32	20,6	0,39	5.249,5	100,00
Jawa Tengah	2.936,8	47,97	2.291,3	37,42	508,1	8,30	377,2	6,16	9,2	0,15	6.122,6	100,00
DI Yogyakarta	254,2	41,75	182,5	29,97	92,7	15,23	74,9	12,31	4,5	0,74	608,9	100,00
Jawa Timur	3.481,5	53,16	2.136,2	32,62	555,6	8,48	348,0	5,31	27,7	0,42	6.549,0	100,00
Banten	487,6	58,72	238,2	28,69	62,9	7,57	38,8	4,67	3,0	0,36	830,4	100,00
Bali	83,3	40,48	63,9	31,06	24,1	11,72	34,4	16,74	0,0	0,00	205,7	100,00
Nusa Tenggara Barat	669,3	62,62	228,4	21,37	102,2	9,56	63,8	5,96	5,3	0,49	1.068,8	100,00
Nusa Tenggara Timur	595,6	53,87	362,8	32,81	85,4	7,72	55,6	5,03	6,3	0,57	1.105,8	100,00
Kalimantan Barat	277,4	55,17	140,0	27,85	45,1	8,97	39,6	7,88	0,7	0,13	502,8	100,00
Kalimantan Tengah	63,1	32,50	89,4	46,02	21,6	11,10	19,8	10,18	0,4	0,19	194,3	100,00
Kalimantan selatan	103,0	48,76	66,0	31,27	27,3	12,94	14,3	6,78	0,5	0,26	211,1	100,00
Kalimantan Timur	112,1	43,20	83,6	32,21	36,8	14,18	25,4	9,80	1,6	0,61	259,5	100,00
Sulawesi Utara	77,1	35,33	75,0	34,38	31,1	14,23	34,3	15,74	0,7	0,32	218,2	100,00
Sulawesi Tengah	190,6	36,29	207,8	39,57	74,9	14,26	49,7	9,46	2,2	0,42	525,2	100,00
Sulawesi Selatan	591,2	56,72	279,7	26,84	100,8	9,67	60,0	5,75	10,5	1,01	1.042,2	100,00
Sulawesi Tenggara	185,0	42,31	134,0	30,66	65,4	14,95	50,9	11,65	1,9	0,43	437,1	100,00
Gorontalo	116,3	63,60	50,3	27,49	9,5	5,18	6,8	3,74	0,0	0,00	182,9	100,00
Sulawesi Barat	78,7	50,19	49,9	31,80	12,7	8,11	15,4	9,82	0,1	0,09	156,9	100,00
Maluku	102,3	26,31	167,2	43,01	61,3	15,78	55,0	14,14	2,9	0,76	388,8	100,00
Maluku Utara	45,3	41,97	37,3	34,59	11,5	10,70	13,1	12,16	0,6	0,58	107,9	100,00
Papua Barat	71,2	30,01	87,3	36,79	37,1	15,65	32,6	13,75	9,0	3,80	237,3	100,00
Papua	369,3	52,07	142,8	20,13	91,0	12,83	94,0	13,25	12,1	1,71	709,3	100,00
Indonesia	16.084,5	46,56	11.789,0	34,13	3.708,2	10,74	2.798,8	8,10	162,2	0,47	34.542,8	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

Tabel 1.8. Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2008

Provinsi	Tidak Bekerja		Pertanian		Industri		lainnya		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nangroe Aceh Darussalam	64,4	6,70	575,6	59,82	28,0	2,91	294,1	30,56	962,1	100,00
Sumatera Utara	124,4	7,72	849,3	52,70	57,7	3,58	580,2	36,00	1.611,5	100,00
Sumatera Barat	41,5	8,77	275,5	58,15	18,3	3,87	138,4	29,22	473,7	100,00
Riau	41,5	7,10	303,3	51,88	12,9	2,21	226,9	38,81	584,7	100,00
Jambi	25,5	9,75	146,3	56,03	3,1	1,17	86,3	33,05	261,2	100,00
Sumatera Selatan	92,3	7,36	686,0	54,69	50,3	4,01	425,7	33,94	1.254,3	100,00
Bengkulu	14,9	4,52	208,6	63,42	7,8	2,36	97,7	29,70	328,9	100,00
Lampung	138,1	8,64	1.008,8	63,13	84,8	5,31	366,1	22,91	1.597,8	100,00
Bangka Belitung	13,0	16,19	29,5	36,71	2,4	3,00	35,4	44,10	80,3	100,00
Kepulauan Riau	14,3	10,86	57,8	43,85	5,2	3,96	54,5	41,32	131,8	100,00
DKI Jakarta	39,3	11,47	11,9	3,47	24,8	7,23	266,5	77,82	342,5	100,00
Jawa Barat	633,8	12,07	1.822,1	34,71	527,5	10,05	2.266,1	43,17	5.249,5	100,00
Jawa Tengah	628,8	10,27	2.960,5	48,35	551,7	9,01	1.981,6	32,37	6.122,6	100,00
DI Yogyakarta	47,1	7,73	279,0	45,82	75,6	12,41	207,3	34,04	608,9	100,00
Jawa Timur	745,7	11,39	3.462,6	52,87	402,2	6,14	1.938,5	29,60	6.549,0	100,00
Banten	119,1	14,35	265,7	32,00	56,3	6,78	389,3	46,87	830,4	100,00
Bali	13,6	6,63	98,8	48,04	24,4	11,85	68,8	33,47	205,7	100,00
Nusa Tenggara Barat	132,1	12,36	524,9	49,11	70,3	6,58	341,5	31,95	1.068,8	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,6	5,57	877,0	79,31	22,7	2,05	144,5	13,07	1.105,8	100,00
Kalimantan Barat	35,1	6,97	343,7	68,36	10,4	2,07	113,6	22,59	502,8	100,00
Kalimantan Tengah	6,3	3,22	138,0	71,04	4,0	2,07	46,0	23,66	194,3	100,00
Kalimantan selatan	18,8	8,93	102,6	48,61	8,7	4,13	80,9	38,34	211,1	100,00
Kalimantan Timur	26,9	10,38	147,0	56,66	3,0	1,16	82,5	31,80	259,5	100,00
Sulawesi Utara	15,7	7,17	119,9	54,96	5,4	2,46	77,3	35,41	218,2	100,00
Sulawesi Tengah	27,8	5,29	389,5	74,16	10,2	1,95	97,7	18,61	525,2	100,00
Sulawesi Selatan	125,1	12,00	687,4	65,96	31,6	3,03	198,1	19,01	1.042,2	100,00
Sulawesi Tenggara	23,0	5,27	299,6	68,53	15,8	3,61	98,7	22,59	437,1	100,00
Gorontalo	6,8	3,72	122,1	66,77	7,8	4,26	46,2	25,26	182,9	100,00
Sulawesi Barat	15,2	9,68	101,7	64,82	6,3	4,03	33,7	21,47	156,9	100,00
Maluku	21,5	5,53	308,8	79,43	7,9	2,04	50,6	13,01	388,8	100,00
Maluku Utara	4,8	4,47	85,4	79,22	0,9	0,85	16,7	15,46	107,9	100,00
Papua Barat	3,6	1,52	168,2	70,88	10,5	4,43	55,0	23,17	237,3	100,00
Papua	10,5	1,47	600,1	84,60	6,8	0,96	91,9	12,96	709,3	100,00
Indonesia	3.332,0	9,65	18.057,2	52,28	2.155,4	6,24	10.998,2	31,84	34.542,8	100,00

Catatan: kolom (2) dan (3) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 1.9. Jumlah dan Disribusi Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi dan Status Pekerjaan
Kepala Rumah Tangga Tahun 2008**

Provinsi	Tidak Bekerja		Berusaha Sendiri		Berusaha Dibantu		Karyawan/ Buruh		Pekerja Keluarga		Total	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nangroe Aceh Darussalam	64,4	6,70	412,0	42,82	283,5	29,47	194,3	20,20	7,8	0,81	962,1	100,00
Sumatera Utara	124,4	7,72	561,2	34,83	510,2	31,66	404,9	25,12	10,8	0,67	1.611,5	100,00
Sumatera Barat	41,5	8,77	222,0	46,86	100,5	21,22	98,9	20,88	10,8	2,27	473,7	100,00
Riau	41,5	7,10	276,7	47,33	77,1	13,18	185,6	31,74	3,8	0,64	584,7	100,00
Jambi	25,5	9,75	109,4	41,89	66,7	25,53	58,0	22,21	1,6	0,62	261,2	100,00
Sumatera Selatan	92,3	7,36	422,9	33,72	433,7	34,58	301,5	24,04	3,9	0,31	1.254,3	100,00
Bengkulu	14,9	4,52	118,1	35,93	151,1	45,96	41,9	12,73	2,9	0,87	328,9	100,00
Lampung	138,1	8,64	506,7	31,71	687,2	43,01	258,9	16,20	7,0	0,44	1.597,8	100,00
Bangka Belitung	13,0	16,19	31,1	38,79	11,1	13,77	24,9	31,06	0,2	0,19	80,3	100,00
Kepulauan Riau	14,3	10,86	68,7	52,11	6,7	5,05	42,2	31,98	0,0	0,00	131,8	100,00
DKI Jakarta	39,3	11,47	160,2	46,77	13,7	4,01	124,5	36,37	4,7	1,38	342,5	100,00
Jawa Barat	633,8	12,07	2.663,5	50,74	784,3	14,94	1.110,7	21,16	57,2	1,09	5.249,5	100,00
Jawa Tengah	628,8	10,27	2.474,4	40,41	1.933,6	31,58	1.035,9	16,92	49,9	0,82	6.122,6	100,00
DI Yogyakarta	47,1	7,73	195,5	32,10	244,4	40,14	115,2	18,91	6,8	1,12	608,9	100,00
Jawa Timur	745,7	11,39	2.510,1	38,33	2.093,3	31,96	1.106,2	16,89	93,7	1,43	6.549,0	100,00
Banten	119,1	14,35	410,7	49,46	140,9	16,96	152,5	18,36	7,3	0,87	830,4	100,00
Bali	13,6	6,63	69,5	33,78	74,6	36,29	44,4	21,59	3,5	1,71	205,7	100,00
Nusa Tenggara Barat	132,1	12,36	455,3	42,60	296,5	27,74	167,3	15,66	17,6	1,65	1.068,8	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,6	5,57	224,3	20,28	758,6	68,60	47,7	4,32	13,6	1,23	1.105,8	100,00
Kalimantan Barat	35,1	6,97	157,5	31,33	208,5	41,47	90,8	18,06	10,9	2,16	502,8	100,00
Kalimantan Tengah	6,3	3,22	80,8	41,59	67,5	34,74	35,4	18,22	4,3	2,23	194,3	100,00
Kalimantan selatan	18,8	8,93	95,9	45,40	60,7	28,76	33,9	16,03	1,9	0,88	211,1	100,00
Kalimantan Timur	26,9	10,38	109,2	42,09	52,2	20,12	68,2	26,28	2,9	1,13	259,5	100,00
Sulawesi Utara	15,7	7,17	117,2	53,72	24,3	11,14	58,5	26,80	2,5	1,16	218,2	100,00
Sulawesi Tengah	27,8	5,29	201,4	38,34	245,0	46,66	46,0	8,75	5,0	0,96	525,2	100,00
Sulawesi Selatan	125,1	12,00	312,0	29,94	488,3	46,85	109,2	10,48	7,6	0,73	1.042,2	100,00
Sulawesi Tenggara	23,0	5,27	146,0	33,39	230,6	52,76	31,6	7,24	5,9	1,34	437,1	100,00
Gorontalo	6,8	3,72	92,3	50,46	59,8	32,69	22,9	12,52	1,1	0,61	182,9	100,00
Sulawesi Barat	15,2	9,68	59,7	38,06	55,7	35,48	25,8	16,45	0,5	0,32	156,9	100,00
Maluku	21,5	5,53	168,1	43,22	160,3	41,22	26,8	6,89	12,2	3,14	388,8	100,00
Maluku Utara	4,8	4,47	44,0	40,82	47,6	44,15	8,6	8,00	2,8	2,55	107,9	100,00
Papua Barat	3,6	1,52	105,9	44,61	80,9	34,08	43,5	18,32	3,5	1,48	237,3	100,00
Papua	10,5	1,47	148,5	20,93	412,9	58,22	69,5	9,80	67,9	9,57	709,3	100,00
Indonesia	3.332,0	9,65	13.730,7	39,75	10.862,1	31,45	6.186,0	17,91	432,0	1,25	34.542,8	100,00

Catatan: kolom (2) & (3) tidak termasuk yang tidak bekerja dengan alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja

<http://www.bps.go.id>

Pendidikan

<http://www.bps.go.id>

Tabel 2.1.a. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Provinsi Tahun 2008 (%)

Miskin				
Propinsi	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 - 24 th	15 - 55 th	7 - 12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	99,6	97,4	98,8	92,2
Sumatera Utara	99,1	97,1	98,1	84,1
Sumatera Barat	99,3	97,4	97,0	82,0
Riau	99,4	98,3	96,8	89,1
Jambi	99,7	96,6	95,5	69,5
Sumatera Selatan	99,5	97,8	96,9	76,3
Bengkulu	99,2	96,1	98,4	82,6
Lampung	99,7	96,5	97,7	80,9
Bangka Belitung	98,4	92,8	93,1	59,5
Kepulauan Riau	100,0	94,5	96,9	88,7
DKI Jakarta	100,0	99,6	97,3	86,9
Jawa Barat	99,7	97,9	96,8	64,5
Jawa Tengah	99,6	93,8	98,1	72,5
DI Yogyakarta	100,0	96,3	98,8	88,0
Jawa Timur	98,8	90,3	97,5	76,3
Banten	99,8	94,2	96,1	72,5
Bali	93,6	87,9	96,2	64,5
Nusa Tenggara Barat	97,6	80,2	96,6	80,4
Nusa Tenggara Timur	95,6	89,6	91,0	69,8
Kalimantan Barat	97,4	89,9	94,8	71,1
Kalimantan Tengah	99,1	97,3	96,9	81,5
Kalimantan Selatan	99,1	96,0	95,2	68,8
Kalimantan Timur	99,6	95,2	96,2	86,2
Sulawesi Utara	99,9	99,1	96,4	76,2
Sulawesi Tengah	99,4	94,5	94,5	68,9
Sulawesi Selatan	95,1	82,3	93,4	69,1
Sulawesi Tenggara	98,6	93,2	96,7	79,9
Gorontalo	98,3	93,7	89,9	61,0
Sulawesi Barat	91,1	83,3	90,2	65,9
Maluku	99,4	98,5	97,7	88,1
Maluku Utara	98,6	96,6	98,3	85,4
Papua Barat	91,8	88,3	93,1	85,4
Papua	82,5	60,4	78,8	72,9
Indonesia	98,6	92,9	96,3	75,0

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 2.1.b. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut
Provinsi Tahun 2008 (%)**

Tidak Miskin

Propinsi	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 - 24 th	15 - 55 th	7 - 12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	99,8	98,4	99,1	94,9
Sumatera Utara	99,8	99,0	98,8	92,0
Sumatera Barat	99,8	98,8	98,2	89,4
Riau	99,9	99,4	98,5	91,8
Jambi	99,9	98,3	97,8	86,2
Sumatera Selatan	99,7	98,8	98,0	85,9
Bengkulu	99,8	97,7	98,3	87,7
Lampung	100,0	97,8	98,4	86,2
Bangka Belitung	99,7	97,6	97,1	81,3
Kepulauan Riau	99,8	96,7	98,4	91,3
DKI Jakarta	100,0	99,6	99,1	90,6
Jawa Barat	99,9	98,6	98,4	82,8
Jawa Tengah	99,8	96,7	99,0	86,8
DI Yogyakarta	100,0	98,6	99,5	93,6
Jawa Timur	99,5	95,8	98,9	88,6
Banten	100,0	98,3	97,9	81,3
Bali	99,3	93,8	98,6	89,0
Nusa Tenggara Barat	99,2	88,3	97,3	86,8
Nusa Tenggara Timur	97,9	93,9	94,9	80,1
Kalimantan Barat	99,1	93,3	97,3	85,7
Kalimantan Tengah	99,8	98,8	98,6	86,7
Kalimantan Selatan	99,9	97,9	97,7	79,7
Kalimantan Timur	99,8	98,1	98,6	91,1
Sulawesi Utara	99,9	99,7	98,0	89,5
Sulawesi Tengah	99,7	97,7	98,1	84,0
Sulawesi Selatan	98,4	92,8	96,1	80,3
Sulawesi Tenggara	99,5	96,1	97,9	86,8
Gorontalo	99,1	97,7	95,4	80,7
Sulawesi Barat	96,7	92,2	95,5	76,9
Maluku	99,7	98,7	97,3	92,9
Maluku Utara	99,7	98,3	96,7	89,8
Papua Barat	97,9	94,0	93,3	91,2
Papua	89,5	78,7	87,0	81,5
Indonesia	99,6	97,1	98,2	86,4

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 2.1.c. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut
Provinsi Tahun 2008 (%)**

Miskin+ Tidak Miskin				
Propinsi	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15 - 24 th	15 - 55 th	7 -12 th	13 - 15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangroe Aceh Darussalam	99,7	98,2	99,0	94,1
Sumatera Utara	99,7	98,8	98,7	90,9
Sumatera Barat	99,7	98,7	98,1	88,4
Riau	99,9	99,3	98,3	91,5
Jambi	99,9	98,2	97,5	84,6
Sumatera Selatan	99,7	98,6	97,8	84,0
Bengkulu	99,7	97,4	98,3	86,6
Lampung	99,9	97,5	98,2	85,0
Bangka Belitung	99,6	97,3	96,7	79,1
Kepulauan Riau	99,8	96,6	98,2	91,0
DKI Jakarta	100,0	99,6	99,0	90,4
Jawa Barat	99,9	98,5	98,2	80,1
Jawa Tengah	99,7	96,2	98,8	83,8
DI Yogyakarta	100,0	98,2	99,3	92,4
Jawa Timur	99,4	94,9	98,6	86,3
Banten	99,9	98,0	97,6	80,4
Bali	99,0	93,5	98,4	87,6
Nusa Tenggara Barat	98,9	86,7	97,1	85,1
Nusa Tenggara Timur	97,4	93,0	93,7	77,4
Kalimantan Barat	99,0	93,0	97,0	83,8
Kalimantan Tengah	99,7	98,7	98,4	86,1
Kalimantan Selatan	99,8	97,8	97,5	78,8
Kalimantan Timur	99,7	97,9	98,3	90,5
Sulawesi Utara	99,9	99,6	97,8	87,9
Sulawesi Tengah	99,6	97,1	97,1	80,6
Sulawesi Selatan	98,0	91,6	95,6	78,6
Sulawesi Tenggara	99,3	95,7	97,6	85,4
Gorontalo	99,0	96,9	94,0	76,5
Sulawesi Barat	95,9	90,9	94,4	74,9
Maluku	99,6	98,6	97,5	91,3
Maluku Utara	99,6	98,2	96,9	89,2
Papua Barat	95,9	92,3	93,2	88,7
Papua	87,3	72,9	83,4	77,9
Indonesia	99,5	96,6	97,8	84,4

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 2.2. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 7-12
menurut Provinsi Tahun 2008 (%)**

Propinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	0,09	0,27	0,21
Sumatera Utara	0,00	0,13	0,11
Sumatera Barat	0,65	0,38	0,42
Riau	0,34	0,33	0,33
Jambi	1,79	0,87	0,98
Sumatera Selatan	0,58	0,66	0,64
Bengkulu	0,80	0,61	0,65
Lampung	0,15	0,21	0,19
Bangka Belitung	4,98	2,03	2,35
Kepulauan Riau	0,65	0,26	0,31
DKI Jakarta	0,00	0,38	0,36
Jawa Barat	0,34	0,07	0,11
Jawa Tengah	0,12	0,21	0,19
DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	0,39	0,33	0,35
Banten	0,25	0,41	0,39
Bali	0,66	0,12	0,16
Nusa Tenggara Barat	0,89	0,90	0,90
Nusa Tenggara Timur	1,68	1,23	1,37
Kalimantan Barat	1,10	0,48	0,56
Kalimantan Tengah	0,31	0,39	0,38
Kalimantan Selatan	1,39	0,69	0,75
Kalimantan Timur	0,17	0,20	0,20
Sulawesi Utara	0,79	0,93	0,91
Sulawesi Tengah	0,87	0,90	0,89
Sulawesi Selatan	2,05	1,95	1,97
Sulawesi Tenggara	0,05	0,08	0,07
Gorontalo	4,73	2,84	3,29
Sulawesi Barat	0,27	0,52	0,48
Maluku	1,36	1,10	1,19
Maluku Utara	0,00	1,64	1,40
Papua Barat	2,84	4,64	3,89
Papua	0,77	1,46	1,17
Indonesia	0,52	0,43	0,44

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 2.3. Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15
menurut Provinsi Tahun 2008 (%)**

Propinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	3,42	2,66	2,88
Sumatera Utara	9,42	4,56	5,19
Sumatera Barat	14,54	7,82	8,60
Riau	4,29	4,85	4,77
Jambi	17,22	7,53	8,30
Sumatera Selatan	15,96	7,37	8,87
Bengkulu	11,56	7,45	8,25
Lampung	10,86	6,82	7,67
Bangka Belitung	37,20	14,90	16,58
Kepulauan Riau	8,61	4,60	5,03
DKI Jakarta	7,13	4,48	4,66
Jawa Barat	18,71	6,88	8,31
Jawa Tengah	7,57	3,85	4,52
DI Yogyakarta	6,10	4,36	4,71
Jawa Timur	10,41	4,39	5,41
Banten	13,55	7,00	7,59
Bali	24,44	6,36	7,13
Nusa Tenggara Barat	13,51	6,61	8,32
Nusa Tenggara Timur	24,21	13,41	16,01
Kalimantan Barat	19,51	9,65	10,76
Kalimantan Tengah	10,52	7,47	7,79
Kalimantan Selatan	27,66	11,82	13,00
Kalimantan Timur	8,67	5,36	5,72
Sulawesi Utara	19,08	9,24	10,23
Sulawesi Tengah	19,49	9,76	11,62
Sulawesi Selatan	19,45	10,97	12,09
Sulawesi Tenggara	12,24	8,20	8,97
Gorontalo	41,91	18,41	22,41
Sulawesi Barat	22,06	10,49	12,32
Maluku	5,49	4,31	4,69
Maluku Utara	9,93	7,16	7,55
Papua Barat	8,95	8,78	8,85
Papua	10,49	8,22	9,10
Indonesia	12,36	6,26	7,20

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

<http://www.bps.go.id>

Ketenagakerjaan

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 3.1. Persentase Pekerja Informal menurut Provinsi
Tahun 2007 dan 2008**

Provinsi	2007	2008
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	67,42	63,21
Sumatera Utara	59,87	60,22
Sumatera Barat	62,45	65,66
Riau	53,49	53,28
Jambi	66,02	66,93
Sumatera Selatan	70,85	68,26
Bengkulu	74,24	73,61
Lampung	69,85	73,21
Bangka Belitung	53,12	54,97
Kepulauan Riau	34,53	47,28
DKI Jakarta	32,78	33,59
Jawa Barat	51,43	57,89
Jawa Tengah	61,55	66,26
DI Yogyakarta	58,59	59,24
Jawa Timur	60,30	64,43
Banten	46,73	48,82
Bali	60,10	59,71
Nusa Tenggara Barat	72,23	74,14
Nusa Tenggara Timur	84,08	83,43
Kalimantan Barat	71,47	73,23
Kalimantan Tengah	69,47	70,96
Kalimantan selatan	68,45	66,63
Kalimantan Timur	50,01	46,34
Sulawesi Utara	58,23	58,78
Sulawesi Tengah	72,62	76,07
Sulawesi Selatan	70,83	71,01
Sulawesi Tenggara	74,94	75,96
Gorontalo	60,92	66,09
Sulawesi Barat	81,14	72,71
Maluku	76,63	77,10
Maluku Utara	77,49	76,45
Papua Barat	71,92	71,37
Papua	79,94	81,96
Indonesia	60,06	62,84

Sumber: Diolah dari Susenas Panel Modul Konsumsi 2007 dan Susenas Modul Konsumsi 2008

<http://www.bps.go.id>

Kesehatan

<http://www.bps.go.id>

**Tabel 4.1.a. Persentase Balita yang Diimunisasi menurut Provinsi
Tahun 2008**

Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	79,55	76,58	81,79	71,82	71,73
Sumatera Utara	71,17	68,45	75,06	57,75	57,98
Sumatera Barat	80,79	74,48	78,72	65,82	69,14
Riau	79,05	77,15	78,65	66,97	68,36
Jambi	75,33	74,15	73,03	61,82	63,33
Sumatera Selatan	83,21	78,21	77,80	67,18	71,68
Bengkulu	92,55	87,53	86,38	78,16	86,67
Lampung	92,71	89,94	90,34	80,56	89,28
Bangka Belitung	79,73	76,76	81,91	73,21	74,68
Kepulauan Riau	81,02	79,29	84,47	75,12	77,09
DKI Jakarta	94,73	93,07	90,84	72,71	84,10
Jawa Barat	87,69	83,73	88,44	71,77	76,55
Jawa Tengah	94,94	90,17	90,32	78,79	86,56
DI Yogyakarta	97,62	94,25	93,92	83,42	95,64
Jawa Timur	89,03	85,21	84,98	74,61	79,48
Banten	76,71	71,00	81,49	50,64	46,29
Bali	95,55	94,95	92,55	84,13	92,35
Nusa Tenggara Barat	93,87	89,61	89,34	78,36	88,14
Nusa Tenggara Timur	88,29	85,12	86,51	77,04	79,66
Kalimantan Barat	74,56	73,63	76,41	63,03	68,14
Kalimantan Tengah	79,80	75,07	79,01	71,08	69,60
Kalimantan selatan	78,12	76,25	77,29	62,23	65,45
Kalimantan Timur	88,19	85,54	84,17	76,82	80,00
Sulawesi Utara	94,65	89,08	87,17	76,13	86,07
Sulawesi Tengah	77,63	73,54	77,74	62,98	65,77
Sulawesi Selatan	79,53	75,34	76,38	66,58	70,87
Sulawesi Tenggara	83,76	80,87	82,24	73,75	79,83
Gorontalo	85,23	83,00	86,23	75,42	82,02
Sulawesi Barat	63,81	63,35	63,75	57,33	61,48
Maluku	65,70	60,64	67,18	57,92	55,95
Maluku Utara	76,60	73,02	79,89	66,26	70,23
Papua Barat	90,22	83,29	82,67	76,11	77,88
Papua	53,30	52,71	54,80	45,74	46,70
Indonesia	85,65	81,89	83,88	71,38	76,10

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 4.1.b. Persentase Balita yang Diimunisasi menurut Provinsi
Tahun 2008**

Tidak Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	82,76	80,84	86,45	72,32	75,46
Sumatera Utara	81,58	79,09	82,85	68,11	71,38
Sumatera Barat	86,82	81,99	83,20	70,37	78,11
Riau	87,86	85,08	85,47	74,42	80,37
Jambi	89,32	84,90	84,55	75,20	79,22
Sumatera Selatan	92,15	87,90	88,17	77,54	83,82
Bengkulu	94,39	90,61	89,48	80,73	89,06
Lampung	92,69	89,53	89,09	79,20	88,32
Bangka Belitung	89,29	83,60	84,64	75,48	81,20
Kepulauan Riau	87,91	84,56	88,42	75,87	82,05
DKI Jakarta	94,74	91,28	91,34	77,14	90,08
Jawa Barat	92,71	88,24	89,27	77,07	84,71
Jawa Tengah	96,70	91,86	91,60	80,96	89,98
DI Yogyakarta	99,44	94,80	93,62	84,34	96,22
Jawa Timur	93,73	89,55	89,90	79,37	87,39
Banten	85,55	82,24	86,18	68,24	71,24
Bali	97,97	92,16	91,32	82,94	94,76
Nusa Tenggara Barat	96,44	90,73	90,94	81,53	91,61
Nusa Tenggara Timur	91,29	88,89	88,92	80,43	84,30
Kalimantan Barat	83,47	80,16	82,37	70,35	76,80
Kalimantan Tengah	85,71	81,86	84,18	75,83	78,96
Kalimantan selatan	87,24	84,48	84,03	73,32	78,28
Kalimantan Timur	94,20	89,82	89,10	80,09	87,44
Sulawesi Utara	96,46	91,58	91,18	81,61	89,42
Sulawesi Tengah	89,31	85,25	88,47	77,27	82,94
Sulawesi Selatan	89,87	86,45	85,76	75,62	83,20
Sulawesi Tenggara	90,03	86,83	87,66	78,69	86,36
Gorontalo	92,05	89,40	88,70	78,77	85,46
Sulawesi Barat	80,72	75,91	80,05	68,53	75,10
Maluku	82,05	78,50	82,88	73,21	77,89
Maluku Utara	83,04	79,54	83,91	73,86	75,74
Papua Barat	89,74	84,73	85,46	68,55	74,51
Papua	79,52	75,65	76,86	68,26	72,11
Indonesia	91,12	87,16	88,11	76,50	83,70

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 4.1.c. Persentase Balita yang Diimunisasi menurut Provinsi
Tahun 2008**

Miskin + Tidak Miskin					
Provinsi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep-B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nangroe Aceh Darussalam	81,92	79,74	85,24	72,19	74,49
Sumatera Utara	79,76	77,23	81,48	66,30	69,03
Sumatera Barat	85,94	80,90	82,55	69,71	76,81
Riau	86,76	84,09	84,62	73,49	78,88
Jambi	87,64	83,61	83,17	73,59	77,31
Sumatera Selatan	90,20	85,78	85,91	75,28	81,17
Bengkulu	93,94	89,86	88,72	80,10	88,48
Lampung	92,70	89,64	89,42	79,56	88,58
Bangka Belitung	88,28	82,88	84,35	75,24	80,51
Kepulauan Riau	87,15	83,98	87,98	75,79	81,50
DKI Jakarta	94,74	91,37	91,31	76,90	89,75
Jawa Barat	91,89	87,51	89,13	76,21	83,39
Jawa Tengah	96,27	91,45	91,29	80,43	89,15
DI Yogyakarta	99,04	94,68	93,69	84,14	96,09
Jawa Timur	92,70	88,60	88,82	78,32	85,65
Banten	84,59	81,01	85,67	66,32	68,52
Bali	97,77	92,39	91,42	83,04	94,56
Nusa Tenggara Barat	95,65	90,39	90,46	80,56	90,55
Nusa Tenggara Timur	90,32	87,67	88,14	79,34	82,80
Kalimantan Barat	82,24	79,26	81,55	69,35	75,61
Kalimantan Tengah	85,10	81,16	83,65	75,34	77,99
Kalimantan selatan	86,43	83,75	83,43	72,34	77,14
Kalimantan Timur	93,56	89,36	88,58	79,74	86,65
Sulawesi Utara	96,21	91,24	90,63	80,87	88,96
Sulawesi Tengah	86,08	82,02	85,50	73,32	78,19
Sulawesi Selatan	87,94	84,38	84,02	73,94	80,90
Sulawesi Tenggara	88,46	85,34	86,31	77,45	84,72
Gorontalo	90,14	87,61	88,01	77,84	84,50
Sulawesi Barat	76,64	72,88	76,11	65,83	71,81
Maluku	76,04	71,94	77,11	67,59	69,83
Maluku Utara	82,08	78,56	83,31	72,72	74,92
Papua Barat	89,92	84,19	84,42	71,37	75,77
Papua	68,99	66,44	68,00	59,22	61,91
Indonesia	90,06	86,14	87,29	75,52	82,23

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 4.2.a. Persentase Penolong Persalinan Pertama
oleh Tenaga Kesehatan menurut Provinsi Tahun 2008**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	67,12	82,47	78,49
Sumatera Utara	75,14	86,22	84,28
Sumatera Barat	75,24	87,84	86,01
Riau	55,16	77,25	74,50
Jambi	49,85	63,18	61,58
Sumatera Selatan	61,08	72,22	69,79
Bengkulu	66,32	78,22	75,32
Lampung	59,15	72,51	68,97
Bangka Belitung	56,86	74,16	72,34
Kepulauan Riau	61,39	80,64	78,51
DKI Jakarta	90,36	96,82	96,47
Jawa Barat	40,80	65,01	61,09
Jawa Tengah	66,84	82,55	78,71
DI Yogyakarta	91,06	97,11	95,78
Jawa Timur	68,81	86,29	82,44
Banten	29,18	64,61	60,75
Bali	88,67	96,23	95,59
Nusa Tenggara Barat	47,01	65,35	59,74
Nusa Tenggara Timur	26,25	45,61	39,35
Kalimantan Barat	34,24	55,22	52,33
Kalimantan Tengah	35,96	54,88	52,92
Kalimantan selatan	49,88	69,81	68,05
Kalimantan Timur	52,20	80,88	77,83
Sulawesi Utara	68,33	80,29	78,66
Sulawesi Tengah	28,47	51,03	44,79
Sulawesi Selatan	36,41	62,52	57,65
Sulawesi Tenggara	23,27	42,48	37,68
Gorontalo	20,76	45,08	38,30
Sulawesi Barat	8,67	29,73	24,65
Maluku	24,34	49,63	40,34
Maluku Utara	17,89	33,00	30,74
Papua Barat	45,64	62,63	56,30
Papua	22,92	58,39	44,15
Indonesia	53,95	73,96	70,11

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 4.2.b. Persentase Penolong Persalinan Terakhir
oleh Tenaga Kesehatan menurut Provinsi Tahun 2008**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	71,81	87,03	83,08
Sumatera Utara	77,74	88,71	86,79
Sumatera Barat	78,19	90,21	88,47
Riau	63,54	82,13	79,82
Jambi	55,06	71,56	69,58
Sumatera Selatan	68,50	78,90	76,63
Bengkulu	74,32	83,59	81,33
Lampung	65,37	77,91	74,59
Bangka Belitung	64,32	82,03	80,17
Kepulauan Riau	81,23	89,04	88,18
DKI Jakarta	92,40	97,39	97,12
Jawa Barat	46,02	70,06	66,16
Jawa Tengah	74,28	88,68	85,16
DI Yogyakarta	93,95	97,75	96,91
Jawa Timur	71,80	88,17	84,57
Banten	32,49	68,62	64,69
Bali	89,86	97,09	96,49
Nusa Tenggara Barat	53,83	73,60	67,56
Nusa Tenggara Timur	32,84	52,52	46,15
Kalimantan Barat	40,82	64,44	61,19
Kalimantan Tengah	45,72	61,03	59,44
Kalimantan selatan	57,68	77,56	75,80
Kalimantan Timur	59,09	84,65	81,92
Sulawesi Utara	72,36	83,90	82,32
Sulawesi Tengah	39,72	65,54	58,40
Sulawesi Selatan	42,35	68,38	63,53
Sulawesi Tenggara	34,96	58,80	52,84
Gorontalo	45,38	65,49	59,88
Sulawesi Barat	25,14	45,91	40,90
Maluku	26,10	54,48	44,05
Maluku Utara	20,49	40,59	37,58
Papua Barat	47,00	64,27	57,83
Papua	26,64	61,78	47,67
Indonesia	59,64	78,87	75,17

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 4.3. Persentase Pengguna Alat KB menurut Provinsi
Tahun 2008**

Provinsi	Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nangroe Aceh Darussalam	52,09	53,60	53,30
Sumatera Utara	53,10	55,77	55,50
Sumatera Barat	54,37	60,31	59,77
Riau	64,35	68,51	68,14
Jambi	69,09	74,08	73,67
Sumatera Selatan	72,39	71,34	71,51
Bengkulu	80,17	80,05	80,07
Lampung	71,60	74,16	73,67
Bangka Belitung	62,10	74,20	73,37
Kepulauan Riau	73,34	69,96	70,24
DKI Jakarta	82,87	70,61	70,99
Jawa Barat	67,86	73,73	73,08
Jawa Tengah	62,16	67,95	66,92
DI Yogyakarta	61,94	65,20	64,61
Jawa Timur	59,59	67,48	66,11
Banten	66,33	71,62	71,25
Bali	77,83	76,20	76,28
Nusa Tenggara Barat	60,13	66,74	65,32
Nusa Tenggara Timur	45,24	48,79	47,97
Kalimantan Barat	73,09	71,56	71,70
Kalimantan Tengah	80,27	79,70	79,74
Kalimantan selatan	71,48	73,48	73,37
Kalimantan Timur	71,76	73,87	73,72
Sulawesi Utara	85,71	82,56	82,82
Sulawesi Tengah	70,95	70,36	70,46
Sulawesi Selatan	49,22	51,83	51,52
Sulawesi Tenggara	58,90	61,23	60,83
Gorontalo	77,61	77,10	77,19
Sulawesi Barat	42,33	52,82	51,29
Maluku	35,32	47,51	44,33
Maluku Utara	49,96	59,77	58,79
Papua Barat	39,50	46,29	44,32
Papua	35,08	47,29	43,48
Indonesia	61,99	68,19	67,33

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

Fasilitas Perumahan

<http://www.briefindo.com>

**Tabel 5.1.a. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih,
Jamban Sendiri/ bersama menurut Provinsi Tahun 2008**

Miskin		
Propinsi	Air Bersih	Jamban Sendiri/ bersama
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	26,73	48,36
Sumatera Utara	38,76	62,09
Sumatera Barat	28,69	39,53
Riau	15,13	68,20
Jambi	32,75	55,79
Sumatera Selatan	38,43	56,75
Bengkulu	16,48	48,90
Lampung	31,83	73,99
Bangka Belitung	37,21	36,43
Kepulauan Riau	42,28	80,35
DKI Jakarta	75,26	83,36
Jawa Barat	33,13	53,50
Jawa Tengah	45,21	55,25
DI Yogyakarta	48,77	83,09
Jawa Timur	53,01	57,58
Banten	27,75	33,13
Bali	51,70	51,45
Nusa Tenggara Barat	34,19	28,18
Nusa Tenggara Timur	36,85	63,07
Kalimantan Barat	8,03	41,01
Kalimantan Tengah	20,76	53,66
Kalimantan Selatan	37,34	52,16
Kalimantan Timur	28,60	65,72
Sulawesi Utara	40,80	62,24
Sulawesi Tengah	29,53	30,16
Sulawesi Selatan	35,98	41,82
Sulawesi Tenggara	44,30	47,37
Gorontalo	28,50	19,47
Sulawesi Barat	29,48	31,22
Maluku	39,75	35,41
Maluku Utara	25,42	26,86
Papua Barat	30,67	44,46
Papua	17,55	41,36
Indonesia	39,66	54,41

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 5.1.b. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih,
Jamban Sendiri/ bersama menurut Provinsi Tahun 2008**

Tidak Miskin

Propinsi	Air Bersih	Jamban Sendiri/ bersama
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	44,69	67,38
Sumatera Utara	52,32	80,13
Sumatera Barat	49,78	66,24
Riau	38,21	88,16
Jambi	46,85	74,46
Sumatera Selatan	48,42	74,93
Bengkulu	29,61	68,96
Lampung	47,95	85,95
Bangka Belitung	50,75	67,37
Kepulauan Riau	70,66	93,43
DKI Jakarta	88,13	93,90
Jawa Barat	51,15	77,84
Jawa Tengah	59,58	76,34
DI Yogyakarta	71,25	92,93
Jawa Timur	66,73	76,03
Banten	52,95	69,45
Bali	74,59	83,59
Nusa Tenggara Barat	52,81	55,80
Nusa Tenggara Timur	46,35	76,33
Kalimantan Barat	20,18	67,15
Kalimantan Tengah	32,44	68,14
Kalimantan Selatan	51,83	72,98
Kalimantan Timur	67,30	88,13
Sulawesi Utara	57,15	80,69
Sulawesi Tengah	47,84	64,19
Sulawesi Selatan	56,00	73,33
Sulawesi Tenggara	56,40	70,61
Gorontalo	43,58	49,41
Sulawesi Barat	40,15	52,24
Maluku	49,28	61,79
Maluku Utara	39,45	59,36
Papua Barat	54,64	75,45
Papua	34,27	69,10
Indonesia	56,13	76,70

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

**Tabel 5.1.c. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih,
Jamban Sendiri/ bersama menurut Provinsi Tahun 2008**

Miskin + Tidak Miskin		
Propinsi	Air Bersih	Jamban Sendiri/ bersama
(1)	(2)	(3)
Nangroe Aceh Darussalam	41,24	63,72
Sumatera Utara	51,06	78,45
Sumatera Barat	48,08	64,08
Riau	36,15	86,37
Jambi	45,86	73,14
Sumatera Selatan	47,01	72,35
Bengkulu	27,58	65,86
Lampung	45,06	83,80
Bangka Belitung	49,91	65,43
Kepulauan Riau	68,89	92,61
DKI Jakarta	87,77	93,61
Jawa Barat	49,31	75,36
Jawa Tengah	57,29	72,97
DI Yogyakarta	67,93	91,48
Jawa Timur	64,62	73,20
Banten	51,35	67,13
Bali	73,51	82,08
Nusa Tenggara Barat	49,22	50,47
Nusa Tenggara Timur	44,39	73,59
Kalimantan Barat	19,13	64,88
Kalimantan Tengah	31,67	67,18
Kalimantan Selatan	51,13	71,96
Kalimantan Timur	64,63	86,59
Sulawesi Utara	55,82	79,18
Sulawesi Tengah	44,79	58,52
Sulawesi Selatan	53,82	69,91
Sulawesi Tenggara	54,49	66,94
Gorontalo	41,04	44,36
Sulawesi Barat	38,70	49,38
Maluku	47,05	55,61
Maluku Utara	38,16	56,38
Papua Barat	49,50	68,81
Papua	29,46	61,12
Indonesia	54,09	73,93

Sumber: Diolah dari Susenas Modul Konsumsi 2008

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, 2002, *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*, BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2002, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2003, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2003, *Data Kemiskinan untuk Penghitungan Dana Alokasi Umum (laporan intern)*, BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2004, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007, Buku 1: Provinsi*, BPS: Jakarta.

Tim Penyusun

Penanggung jawab/Pengarah : Drs. Wynandin Imawan, M.Sc
Koordinator : Ir. Wien Kusdiatmono, M.M
Anggota : 1. Nursyahrizal, M.Si
2. Dewa Eka Ayu
3. Suhariadi
4. Hendrawan Toni
5. Retno Haritsah

<http://www.bps.go.id>



Pastikan Anda dihitung!

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax.: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2008

<http://www.ps.go.id>